Analisis Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Ambon

Angel Merlyn Pattimahu

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

angelpattimahu25@gmail.com

Abstrak

Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies grants local governments the authority to develop financial resource potential by establishing new types of taxes and levies not previously regulated, provided they meet specified criteria and reflect public aspirations. Regional taxes, as a component of Local Own-Source Revenue (PAD), are used to finance various local expenditures, both routine and developmental. Regional taxes are expected to serve as a vital funding source for local governance and development, and to contribute to the improvement and equal distribution of public welfare. Regional taxes are divided into two main categories: provincial taxes and regency/municipal taxes. This study aims to examine the contribution and growth rate of restaurant taxes in Ambon City. The research method employed is quantitative descriptive analysis, primarily used to describe the results of the calculation of the contribution and growth rate of restaurant taxes to Ambon City's PAD. The study was conducted at the Ambon City Revenue Office. The object of the study is restaurant tax revenue, which contributes to the city's local revenue. The results show that, based on contribution analysis, restaurant tax revenue from 2019 to 2024 has experienced fluctuations. The growth rate significantly increased in 2022, followed by a decline in the following year. However, this decline indicates a return to market stability similar to the pre-pandemic period in 2019. These fluctuations were influenced by the COVID-19 pandemic, shifts in consumer behavior, price dynamics, as well as fiscal policy and the implementation of tax collection technologies.

Keywords: *Restaurant Tax, Contribution, Growth Rate, Local Revenue (PAD)*

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan potensi sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi baru yang belum diatur sebelumnya, dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah, baik yang bersifat rutin maupun untuk tujuan pembangunan. Pajak daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan yang vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta berkontribusi dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah terdiri dari dua kategori utama, yakni pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak restaurant dan laju pertumbuhan pajak restaurant di kota ambon. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, terutama dalam mendiskripsikan hasil – hasil perhitungan kontribusi dan laju pertumbuhan pajak restaurant dalam pendapatan asli daerah kota ambon. Tempat Penelitian yang diambil adalah Dinas Pendapatan daerah kota ambon. Objek Penelitian adalah penerimaan pungutan pajak Restaurant yang memberikan kontribusi terhadap PAD pemerintah kota ambon. Penelitian ini menunjukkan perhitungan dengan menggunakan analisis kontribusi dapat diketahui bahwa pajak restaurant 6 tahun terakhir 2019 - 2024 mengalami fluktuasi dan laju pertumbuhan pada periode 2022 sempat mengalami kenaikan yang signifikan namun kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan namun mulai menunjukkan stabilitas pasar. Ini dikarenakan pandemi, perubahan perilaku konsumen, dinamika harga, serta kebijakan fiskal dan teknologi pemungutan pajak.

Kata kunci: *Pajak Restaurant, kontribusi, laju pertumbuhan, Pendapatan asli daerah (PAD)*

1. Pendahuluan

Di Indonesia sumber pendapatan yang terbesar berasal dari pajak. Menurut data badan pusat statistik pada tahun 2024 penerimaan negara sekitar 80% berasal dari pajak. Pajak merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk membiayai kegiatan pembangunan, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah perlu mengupayakan optimalisasi berbagai sumber pendapatan guna menjamin keberhasilan pembangunan. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kekuatan sumber penerimaan, di mana pembiayaan pembangunan diutamakan berasal dari penerimaan dalam negeri, sementara penerimaan dari luar negeri hanya berperan sebagai pelengkap.

Berdasarkan fungsinya, sistem perpajakan di Indonesia memiliki dua peran utama, yaitu fungsi **budgetair** (sebagai sumber pendapatan negara) dan fungsi **regulerend** (sebagai instrumen pengatur). Dalam fungsi **budgetair**, pajak berperan sebagai salah satu komponen utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik yang bersifat rutin maupun yang berkaitan dengan pembangunan. Sementara itu, dalam fungsi **regulerend**, pajak digunakan sebagai alat kebijakan untuk mengarahkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah yang tidak semata-mata bersifat fiskal. (Siti 2016).

Pajak dapat diartikan sebagai kewajiban kontribusional yang dibebankan kepada masyarakat kepada negara, yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak memiliki sifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum (Mardiasmo 2016). Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan:

1. Pajak merupakan kontribusi dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara. Kewenangan untuk memungut pajak sepenuhnya berada di tangan negara, dan kontribusi ini tidak diberikan dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk pembayaran tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Berdasarkan undang – undang. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan perundang – undangan serta aturan pelaksanaannya.
3. Pajak dikenakan tanpa adanya imbal jasa secara langsung dari negara yang dapat diidentifikasi atau ditunjuk secara spesifik oleh wajib pajak. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, khususnya pengeluaran-pengeluaran yang bersifat publik dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Agar pelaksanaan pemungutan pajak tidak menimbulkan resistensi atau hambatan dari masyarakat, maka proses pemungutannya perlu memenuhi sejumlah persyaratan tertentu (Mardiasmo 2016):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak mengganggu kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai fungsi **budgetair**, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

Sistem Pemungutan Pajak (Jalil, Fitri Yani 2024)

1. *Official Assessment System*
Negara memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang berdomisili di dalam wilayah yurisdiksinya, tanpa memandang apakah sumber penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri..
2. *Self Assesment System*
Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *With Holding system*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, yang bukan merupakan fiskus maupun wajib pajak itu sendiri, untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaannya didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengatur seluruh urusan pemerintahan. Daerah memiliki hak untuk merumuskan kebijakan lokal yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, mendorong prakarsa, serta memberdayakan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kemajuan sosial yang sejalan dengan tujuan nasional.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi sumber keuangan daerah melalui penetapan jenis pajak dan retribusi yang dapat ditentukan sendiri, selama memenuhi kriteria tertentu dan selaras dengan aspirasi masyarakat. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), berperan dalam membiayai pengeluaran daerah, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu, pajak daerah diharapkan menjadi sumber pendanaan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah guna meningkatkan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kota Ambon merupakan salah satu Kota di Provinsi Maluku yang memiliki potensi yang cukup besar dalam berbagai sektor. Salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon berasal dari kontribusi pajak restoran, yang merupakan sumber penting dalam penerimaan daerah. Setiap tahunnya, pemerintah daerah menetapkan target penerimaan dari pajak ini yang harus dicapai, guna membiayai kegiatan pembangunan dan pengeluaran daerah. Pajak restoran dipandang strategis karena berperan signifikan dalam menunjang pendapatan pajak daerah Kota Ambon

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah Kota Ambon yang dikenakan

secara langsung atas layanan yang disediakan oleh restoran. Dasar perhitungan pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran tersebut. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 11%.

Laju pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjadi tanpa mempertimbangkan apakah peningkatan tersebut lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, serta tanpa memperhatikan adanya perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi (Riski 2018).

Penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan mengingat pentingnya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri. Pajak restoran merupakan salah satu komponen signifikan dalam struktur PAD, terutama di kota-kota yang mengalami pertumbuhan sektor pariwisata, jasa dan kuliner seperti Kota Ambon. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 telah mengubah pola konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi sektor restoran secara drastis, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kontribusi dan pertumbuhannya setelah masa pandemi. Keterdesakan penelitian ini juga ditopang oleh minimnya kajian yang secara spesifik mengkaji dinamika kontribusi pajak restoran di Kota Ambon dalam rentang waktu yang mencakup masa sebelum pandemi, hingga pemulihan ekonomi (2019–2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang relevan sebagai dasar perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih adaptif dan efektif.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal lokasi studi yang difokuskan pada Kota Ambon, yang belum banyak dianalisis dalam konteks kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penelitian ini mengkaji data dalam rentang waktu enam tahun (2019–2025), mencakup periode sebelum pandemic, selama pandemi dan sesudah pandemi COVID-19, sehingga memberikan perspektif temporal yang lebih luas dan relevan. Kebaruan lainnya terletak pada analisis laju pertumbuhan pajak restoran per tahun, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu (Majampoh, Elim, and Suwetja, 2018) hanya melihat dari kontribusi pajak restaurant di kota bitung dengan hasil penelitian tidak ada pengaruh signifikan karena mengalami penurunan setiap tahunnya, penelitian ini mengambil kontribusi dan laju pertumbuhan agar dapat mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan aturan dan strategi yang tepat sasaran untuk menambah PAD Kota Ambon.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon selama enam tahun terakhir. Di tengah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal, sektor pajak daerah, khususnya pajak restoran menjadi salah

satu sumber yang potensial. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal 2020 berdampak besar pada sektor usaha, termasuk restoran, sehingga diduga mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui besar kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Ambon selama periode 2019–2025 dan mengetahui laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Ambon setiap tahunnya dalam periode tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dekritif kuantitatif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menganalisis data tertentu (Sugiyono 2021).

Guna memperoleh data yang akurat maka teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah obeservasi, dokumentasi dan wawancara. Untuk menjawab semua permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai penelitian ini dilakukan menggunakan analisa kontribusi. Dimana metode analisa ini digunakan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restaurant terhadap PAD Kota Ambon. Langkah – langkah yang dilakukan untuk menganalis data adalah sebagai berikut:

1. Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restaurant terhadap Pendapatan asli daerah (PAD kota ambon dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2020-2024 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Pajak Restaurant}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2. Untuk menghitung laju pertumbuhan pajak restaurant terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota ambon dari tahun 2020 – 2025 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Growth = \frac{X1 - X0}{X0} \times 100\%$$

Keterangan:
 Growth = Pertumbuhan pajak restaurant
 X0 = Tahun sebelumnya
 X1 = Tahun Sekarang

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Analisis Kontribusi Pajak Restaurant

Dari data hasil penelitian penulis memperoleh data Realisasi pajak restaurant selama 6 tahun terakhir dari Dinas pendapatan kota ambon yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1
 Kontribusi Pajak Restaurant terhadap PAD Kota Ambon

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restaurant (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi
2019	28,600,573,631.00	184.452.217.679,00	15%
2020	15,925.146,503.00	114.213.988.215,56	13%
2021	19,857,488,029.00	153.520.817.934,78	12%
2022	29,584,498,732.00	177.889.732.162,73	17%
2023	34,367,826,084.00	274.081.392.232,88	12%
2024	38.237.711.685,40	175.555.805.379,68	22%

Sumber: Data Dinas Pendapatan daerah, 2025

Tahun 2019 :

$$Kontribusi = \frac{28,600,573.631.00}{184,452,217,679.00} \times 100 \% = 15 \%$$

Jadi, dilihat dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kotribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota ambon tahun 2019 sebesar 15%.

Tahun 2020 :

$$Kontribusi = \frac{15,925.146.503.00}{114,213,988,215,5} \times 100 \% = 13 \%$$

Jadi, dilihat dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kotribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota ambon tahun 2020 sebesar 13%. Mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 2% . .

Tahun 2021 :

$$Kontribusi = \frac{19,857,488,029.00}{153,520,817,934.78} \times 100 \% = 12 \%$$

Jadi, Berdasarkan hasil perhitungan diatas menjelaskan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon bagian tahun 2021 sebesar 12%. Mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1%.

Tahun 2022 :

$$Kontribusi = \frac{29,854,498,732.00}{177,889,732,162.73} \times 100 \% = 17 \%$$

Jadi, Berdasarkan hasil perhitungan diatas menjelaskan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon Bagian Tahun 2022 sebesar 17%. Mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 5%.

Tahun 2023 :

$$Kontribusi = \frac{34,367,826,084.00}{274,081,392,232.88} \times 100 \% = 12 \%$$

Jadi, Berdasarkan hasil perhitungan diatas menjelaskan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Ambon Bagian Tahun 2023 sebesar 12%. Mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 5%

Tahun 2024 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{38,237,711,685.40}{175,555,805,379.68} \times 100\% = 22\%$$

Jadi, dilihat dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon Tahun 2019 sebesar 22%. Mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 10%.

Analisis Laju pertumbuhan Pajak Restaurant (Growth).

Laju pertumbuhan Pajak Restoran dihitung dengan menggunakan rumus laju pertumbuhan yaitu, membandingkan selisih/perubahan penerimaan Pajak Restoran setiap Tahun Anggaran, dibagi dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya dan dikali 100%.

Tabel 2
 Laju Pertumbuhan Pajak Kota Ambon

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pertumbuhan
2019	28,600,573,631.00	-
2020	15,925,146,503.00	-44,33%
2021	19,857,488,029.00	24,69%
2022	29,584,498,732.00	48,98%
2023	34,367,826,084.00	16,16%
2024	38,237,711,685,40	11,26%

Sumber: Data diolah, 2025

$$2020 = \frac{15,925,146,503.00 - 28,600,573,631.00}{28,600,573,631.00} \times 100\% = -44,33\%$$

Pada Tahun 2020 Tidak mengalami Pertumbuhan namun mengalami penurunan sebesar -44,31%.

$$2021 = \frac{19,857,488,029.00 - 15,925,146,503.00}{15,925,146,503.00} \times 100\% = 24,69\%$$

Tingkat Pertumbuhan penerimaan pajak restaurant pada tahun 2021 sebesar 24,69%

$$2022 = \frac{29,584,498,732.00 - 19,857,488,029.00}{19,857,488,029.00} \times 100\% = 48,98\%$$

Tingkat Pertumbuhan penerimaan pajak restaurant pada tahun 2022 sebesar 48,98%

$$2023 = \frac{34,367,826,084.00 - 29,584,498,732.00}{29,584,498,732.00} \times 100\% = 16,16\%$$

Tingkat Pertumbuhan penerimaan pajak restaurant pada tahun 2023 sebesar 16,16%

$$2024 = \frac{38,237,711,685,40 - 34,367,826,084.00}{34,367,826,084.00} \times 100\% = 11,26\%$$

Tingkat Pertumbuhan penerimaan pajak restaurant pada tahun 2024 sebesar 11,26%

3.2 Pembahasan

Analisis Kontribusi Pajak Restaurant terhadap pendapatan kota ambon.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan yang diperlukan dan sangat diandalkan bagi suatu daerah dalam membiayai kebutuhan daerah tersebut. PAD dipungut berdasarkan peraturan daerah yang bersumber dari peraturan dalam perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Dari hasil yang di dapatkan pajak restaurant di kota ambon memberikan kontribusi yang fluktuasi dari tahun ke tahun terhadap pendapatan asli daerah kota ambon. Dari data 6 tahun terakhir pendapatan dari pajak restaurant di kota ambon memberikan kontribusi kepada PAD Kota Ambon yang terendah pada tahun 2021 dan 2023 sebesar 12%. Pajak resataurat yang tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 22%. Fluktuasi yang terjadi dengan pajak restoran dikarenakan banyak hal, antara lain:

- a. Dampak Pandemi COVID-19 (2020–2021)
 Penurunan kontribusi pada tahun 2020 dan 2021 dapat dijelaskan melalui dampak pandemi COVID-19. Adanya pembatasan sosial, penurunan mobilitas masyarakat, serta pembatasan jam operasional restoran berdampak langsung pada pendapatan sektor kuliner. Tahun 2020 menunjukkan penurunan tajam kontribusi pajak restoran menjadi 13%, dan menurun lebih lanjut pada tahun 2021 menjadi 12%.
- b. Pemulihan Ekonomi dan Konsumsi Pasca-Pandemi (2022)
 Tahun 2022 menunjukkan pemulihan yang signifikan dengan kontribusi pajak restoran naik menjadi 17%. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai kembali mengonsumsi makanan di luar rumah, seiring pelonggaran pembatasan sosial dan peningkatan aktivitas ekonomi.
- c. Anomali Tahun 2023: Kenaikan PAD Global
 Meskipun nilai pajak restoran meningkat secara nominal pada tahun 2023 menjadi Rp34,36 miliar, kontribusinya terhadap PAD justru menurun ke 12%. Penurunan ini disebabkan oleh lonjakan PAD total yang mencapai Rp274,08 miliar, yang kemungkinan besar berasal dari peningkatan signifikan di sektor lain, seperti retribusi, pajak properti, atau penerimaan transfer daerah.
- d. Kenaikan Signifikan di 2024
 Tahun 2024 mencatat kontribusi tertinggi pajak restoran terhadap PAD, yakni 22%, dengan nilai pajak

sebesar Rp38,2 miliar. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan:

- Stabilisasi aktivitas ekonomi pasca-pandemi,
- Peningkatan jumlah dan klasifikasi restoran,
- Pengawasan perpajakan yang lebih ketat,
- Penerapan alat perekam transaksi (*tapping box*) atau sistem pelaporan digital.

Secara keseluruhan, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Ambon menunjukkan tren yang berfluktuasi, tetapi menguat secara positif pada akhir periode (2024). Pemerintah Kota Ambon perlu mempertahankan dan meningkatkan pengawasan, memberikan edukasi sanksi – sanksi ketidakpatuhan pembayaran pajak, serta sistem digitalisasi pajak untuk mengoptimalkan sektor restoran sebagai sumber PAD yang stabil dan berkelanjutan.

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restaurant.

Dari hasil perhitungan analisis laju pertumbuhan Pajak Restaurant di kota ambon dapat dilihat sangat jelas kemampuan pemerintah kota ambon dalam keberhasilan atau tidaknya meningkatkan laju pertumbuhan pajak restaurant. Laju pertumbuhan pajak restaurant kota ambon dapat dilihat:

a. Tahun 2020: Penurunan Drastis akibat Pandemi.

Tahun 2020 penurunan tajam sebesar -44,33% dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan sosial dan lockdown akibat pandemi COVID-19, penurunan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor jasa dan penutupan sementara atau permanen sebagian besar restoran dan kafe.

b. Tahun 2021 – 2022: Masa Pemulihan.

Tahun 2021 mencatat pertumbuhan positif sebesar +24,69%, menandakan awal pemulihan. Tahun berikutnya, 2022, mencatat lonjakan signifikan sebesar +48,98%. Faktor pendorong antara lain Pelonggaran PPKM, peningkatan mobilitas masyarakat, kembalinya kegiatan sosial ekonomi dan digitalisasi adaptasi bisnis restoran terhadap layanan online.

c. Tahun 2023 – 2024: Stabilitas Pertumbuhan.

Tahun 2023 dan 2024 mencatat pertumbuhan masing-masing +16,16% dan +11,26%, menunjukkan tren stabil namun melambat. Penurunan laju pertumbuhan ini bisa disebabkan oleh basis pajak yang sudah tinggi (efek dasar yang besar), pasar restoran yang mulai jenuh, dan pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat.

Mardiasmo (2016), Mengemukakan bahwa pertumbuhan Pajak Daerah masih tergolong lemah disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan yang ada. Pada tahun 2019 tidak ada karena pada tahun 2020 merupakan tahun dasar penelitian ini. Meskipun pertumbuhan tetap positif, tren laju pertumbuhan menunjukkan penurunan secara gradual dari 2023 hingga 2024. Hal ini dapat menunjukkan fase stabilisasi pasar, di mana ekspansi tidak lagi secepat masa awal pemulihan, namun tetap

menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan ini turut didorong oleh kebijakan fiskal daerah, seperti pengawasan pajak melalui digitalisasi (*tapping box*), serta kemampuan pelaku usaha restoran dalam beradaptasi dengan sistem online dan layanan digital. Laju pertumbuhan yang positif selama tiga tahun terakhir memperkuat posisi sektor restoran sebagai sumber strategis PAD di Kota Ambon. Konsistensi pertumbuhan ini menjadi indikasi penting bagi pemerintah dalam menyusun strategi pemungutan pajak yang lebih efisien dan berbasis data.

Hasil analisis kontribusi pada tabel 1 menunjukkan ada kontribusi yang signifikan ke pendapatan asli daerah kota ambon, walaupun mengalami fluktuasi namun memberikan dampak yang cukup besar pada pendapatan asli daerah. Pada tahun 2024 juga kontribusi menguat yaitu 22% ke PAD Kota ambon. Hasil analisis laju pertumbuhan pada tabel 2 juga masih memberikan pertumbuhan yang positif ke PAD kota ambon walaupun dinilai masih kurang berhasil karena melambat pada periode tahun terakhir namun hal ini sudah menunjukkan stabilitas pasar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Salamah (2020) di kota Makassar, Fitriano and Ferina (2021) di kota Bengkulu.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terkait analisis kontribusi dan laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Ambon selama periode 2019-2025, dapat disimpulkan bahwa:

- Pajak restoran memberikan kontribusi positif dan cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon selama periode 2019–2024. Meskipun kontribusinya fluktuatif, angka tertinggi dicapai pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 22% terhadap PAD.
- Penurunan kontribusi pada tahun 2020 dan 2021 terutama dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Sebaliknya, lonjakan kontribusi pada 2022–2024 mencerminkan pemulihan ekonomi dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak.
- Laju pertumbuhan pajak restoran menunjukkan tren pemulihan kuat pasca-pandemi, dengan angka pertumbuhan positif sejak 2021. Namun, pertumbuhan mulai melambat pada 2023 dan 2024, yang mengindikasikan fase stabilisasi pasar.
- Data ini menunjukkan bahwa sektor restoran di Kota Ambon tidak hanya pulih, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal dan sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis dapat memberikan beberapa saran:

- Pemerintah daerah khususnya Dinas pendapatan daerah kota ambon perlu terus memperluas

penggunaan sistem digital seperti *tapping box* dan *e-tax reporting* guna meningkatkan akurasi pelaporan pajak dan mengurangi kebocoran pendapatan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah: (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004)

- Dinas pendapatan daerah kota ambon diharapkan juga meningkatkan tingkat kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat.
- Perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kuliner kecil dan menengah (UMKM) agar mereka masuk dalam sistem perpajakan formal. Ini akan memperluas basis pajak dan menambah potensi penerimaan daerah.
- Pemerintah perlu memantau perubahan perilaku konsumsi masyarakat, terutama dalam penggunaan layanan pesan-antar daring, agar kebijakan pajak dapat terus relevan dan adaptif terhadap tren ekonomi digital.

Daftar Rujukan

- Fitriano, Yun, and Zahrah Indah Ferina. 2021. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 9(1):69–80. doi: 10.37676/ekombis.v9i1.1212.
- Jalil, Fitri Yani, et al. 2024. *Dasar - Dasar Perpajakan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Majampoh, Christian Ferdinand, Inggriani Elim, and I. Gede Suwetja. 2018. "Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(1):280–87. doi: 10.32400/gc.13.04.21102.2018.
- Mardiasmo, M. B. .. 2016. *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Riski, Defia. 2018. "Pengaruh Total Pendapatan Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung." *TECHNOBIZ : International Journal of Business* 1(1):1. doi: 10.33365/tb.v1i1.182.
- Salamah. 2020. "Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar." *Jurnal Pabean* 2(2):233–39.
- Siti, Resmi. 2016. *Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi Revisi*. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004)